PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : BANK INDONESIA (BI)

UNIT KERJA : DEPARTEMEN STATISTIK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **RIZA TYAS UTAMI HIRSAM**
2. Jabatan : **KEPALA DEPARTEMEN**
3. NHK : **276603**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 15.070.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 455 m2/400 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 456 m2/400 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 35 m2/35 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 2.070.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 822.000.000**

1. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOBIL, TOYOTA SIENTA Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
3. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 340.000.000
4. MOTOR, KAWASAKI W175 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
5. MOBIL, MG ZS LUX (4X2) A/T Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
6. MOBIL, MG 4 EV Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 240.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 400.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. 11.805.915.808**

E.	**KAS DAN SETARA KAS**	**Rp.**	**2.491.646.181**
F.	**HARTA LAINNYA**	**Rp.**	**964.598.004**
	Sub Total	**Rp.**	**31.554.159.993**
III.	**HUTANG**	**Rp.**	**1.847.071.923**
IV.	**TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**	**Rp.**	**29.707.088.070**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari *elhkpn.kpk.go.id.* Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui *elhkpn.kpk.go.id*, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.